

## POTRET SUBSIDI PERIKANAN TANGKAP LAUT DI PELABUHANRATU, SUKABUMI

Estu Sri Luhur

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260  
Telp. (021) 53650162, Fax. (021)53650159  
Diterima 12 Jan 2012- Disetujui 24 Mei 2012

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan memaparkan hasil identifikasi jenis-jenis subsidi perikanan tangkap yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk nelayan di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Subsidi perikanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh nelayan adalah subsidi solar yang memberikan harga solar Rp 4.300,- atau selisih Rp 200,- per liter dibandingkan dengan harga solar nonsubsidi. Ada pula jenis subsidi atau bantuan lainnya, yaitu bantuan modal untuk mengkonversi kapal, rumpon, dan bantuan melalui Program Aspirasi. Bantuan melalui Program Aspirasi termasuk jenis bantuan yang baru di Pelabuhanratu yang mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk langsung terjun ke lapangan mengumpulkan aspirasi langsung dari nelayan sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar bantuan yang sangat diperlukan nelayan.

**Kata kunci:** subsidi, harga solar, bahan bakar minyak (BBM), nelayan, Pelabuhanratu

**Abstract :** *Portrait of Marine Capture Fisheries Subsidies in Pelabuhanratu, Sukabumi. By : Estu Sri Luhur.*

*This paper aimed to present the results of identification other types of fishing subsidies that are distributed by central and local governments to fishermen in Pelabuhanratu, Sukabumi district. Current direct fisheries subsidies to fishermen are subsidized diesel fuel at IDR 4.300 or less than IDR 200 per liter compared to price of nonsubsidized diesel fuel. There is also a kind of subsidy or other assistances, including the provision of capital to convert the boat, FADs, and assistance through Aspirations Program. Aspirations Program is a new kind of assistance in Pelabuhanratu that involve Local House of Representatives (DPRD) District Sukabumi as an assistance to their constituent by collecting direct aspiration from the fishermen in need.*

**Keywords :** *subsidies, diesel fuel price, fuel, fishermen, Pelabuhanratu*

### PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan adalah subsidi. Kebijakan subsidi bertujuan untuk memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan guna menjamin keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, istilah subsidi sering disebut juga dengan bantuan oleh para pelaksana kebijakan kepada pelaku usaha. Definisi subsidi perikanan menurut WTO sesuai Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) adalah:

“(a)(1) subsidi terjadi apabila adanya bantuan finansial dari pemerintah atau lembaga publik yang berada di wilayah negara anggota (dalam kesepakatan ini disebut sebagai “pemerintah”), yaitu:

- i. pemerintah terkait transfer modal secara langsung (misalnya, hibah, pinjaman, dan infus ekuitas), transfer dana atau utang yang potensial (misalnya, jaminan pinjaman);
- ii. pendapatan pemerintah terdahulu atau tidak dikumpulkan (misalnya insentif fiskal seperti potongan pajak);
- iii. penyediaan barang/jasa selain infrastruktur atau pembelian barang pemerintah

iv. pembayaran beban yang harus dibayar badan-badan swasta melalui mekanisme pendanaan yang digambarkan dalam poin (i) hingga (iii) di atas yang berbeda dari praktek yang biasa diikuti oleh pemerintah. “ (WTO Report, 2006)

FAO (2001) mendefinisikan subsidi sebagai: “pembayaran baik langsung maupun tidak langsung, konsesi ekonomi, atau hibah istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta atau unit-unit pemerintah lainnya untuk mendorong tujuan publik.” Pemerintah yang dimaksud tidak hanya lembaga penyelenggara negara, tetapi mencakup lembaga-lembaga publik atau internasional. Dalam prakteknya, subsidi dikategorikan apabila ada kontribusi finansial oleh pemerintah atau lembaga publik dalam teritorial negara anggota mencakup: transfer dana secara langsung dalam bentuk hibah, pinjaman, suntikan modal, jaminan pinjaman dan insentif lokal, seperti pemotongan pajak, penyediaan barang dan jasa selain infrastruktur publik, serta dukungan dalam bentuk pendapatan dan harga (Satria et al., 2009).

Menurut FAO (2004), subsidi dapat bersifat positif maupun negatif. Subsidi positif adalah subsidi yang memberikan dampak peningkatan keuntungan bagi perusahaan swasta. Sebaliknya, subsidi negatif

adalah subsidi yang memberikan dampak penurunan keuntungan perusahaan swasta. Lebih lanjut, FAO (2004) mengelompokkan subsidi menjadi empat jenis, yaitu: (a) transfer finansial secara langsung (*Category 1*); (b) jasa dan transfer finansial tidak langsung (*Category 2*); (c) intervensi dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda (*Category 3*); dan (d) pengurangan intervensi (*Category 4*). Untuk kegiatan perikanan, subsidi dibagi menjadi: (a) bantuan finansial langsung untuk pembelian kapal, alat tangkap, modal usaha, penjaminan kredit; (b) program preferensi pajak dan asuransi; (c) subsidi harga dan pemasaran; (d) subsidi program konservasi dan pengelolaan sumberdaya (APEC, 2000).

Kebijakan subsidi perikanan yang terus dilakukan hingga sekarang umumnya diberikan kepada nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan. Tulisan ini membahas pemberian subsidi atau bantuan kepada nelayan di Pelabuhanratu, meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan fisik lainnya.

## SUBSIDI PERIKANAN DI INDONESIA

Subsidi perikanan merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha skala kecil, sekaligus tidak membebani ekonomi nelayan (Anonim, 2010). Ketergantungan nelayan terhadap subsidi cenderung tinggi karena subsidi mampu meminimalisir biaya produksi yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha perikanan. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang identik dengan usaha perikanan, yaitu masalah penyediaan modal usaha penangkapan. Dengan adanya subsidi, nelayan masih dapat melaut karena biaya operasional untuk membeli solar atau alat tangkap yang rusak telah berkurang sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat terus dilakukan.

Secara ekonomi, sumberdaya perikanan merupakan potensi sumberdaya yang menghasilkan manfaat (benefit) kepada nelayan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, kebijakan subsidi perikanan memiliki konsekuensi penting, yaitu subsidi perikanan berpotensi mengganggu kelestarian stok sumberdaya yang selanjutnya akan mengancam keberlanjutan usaha nelayan. Oleh Wium (1999), subsidi ini akan memiliki efek mengurangi stok sumberdaya dan menurunkan hasil tangkapan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki kebijakan untuk selalu mempertahankan subsidi perikanan karena akan sangat membantu nelayan skala kecil atau tradisional (Bambang, 2010). Hal ini dapat dilihat dari peran aktif pemerintah dalam memberikan bantuan finansial kepada nelayan dalam berbagai bentuk, termasuk pada wilayah penangkapan yang telah terjadi kelebihan tangkap (Naamin dan Hardjamulia, 1990; Dwiponggo

dan Ilyas, 1990; Uktolseja, 1990). Bahkan, pada tahun 2012 subsidi benih dan pakan ikan direncanakan mulai digulirkan untuk pembudidaya ikan. Subsidi pemerintah itu berkisar 50 persen dari harga pasar (Lukita, 2011).

Selama ini subsidi yang telah disalurkan oleh pemerintah dan pihak swasta kepada nelayan adalah subsidi untuk input produksi perikanan berupa subsidi langsung dan tidak langsung. Pada usaha perikanan tangkap, misalnya, subsidi langsung yang sangat dirasakan manfaatnya bagi nelayan adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar. Kebijakan subsidi solar ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur tentang pemberian subsidi BBM kepada nelayan dan pembudidaya ikan untuk kapal berbobot 30 gross ton (GT) dengan jumlah BBM sebanyak 25 kilo liter (KL) per bulan. Tempat penyaluran subsidi solar diatur melalui sarana prasarana penyaluran BBM yang dibangun pada pusat-pusat pendaratan ikan dalam bentuk Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bersubsidi (SPBB), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Di Pelabuhanratu, SPDN dan SPBN berada di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu.

Selain subsidi BBM, pemerintah juga menyalurkan bantuan fisik kepada nelayan dan pembudidaya di seluruh daerah Indonesia. Bantuan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk mengatur, mengelola dan menyalurkannya. Untuk nelayan, bantuan yang seringkali diberikan berupa armada penangkapan beserta alat tangkapnya, mesin kapal, GPS, pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat penyimpanan ikan (*cool box*). Bantuan untuk pembudidaya berupa benih ikan, biaya perbaikan tambak, gudang pakan, bibit rumput laut, para-para, jaring dan perlengkapan budidaya lainnya. Bentuk bantuan lainnya yang juga diberikan berupa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan dan pembudidaya dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga memberikan bantuan dengan membuka akses pasar melalui kerja sama dengan swasta dan lembaga pemerintahan lainnya.

## SUBSIDI PERIKANAN DI PELABUHANRATU, SUKABUMI

Subsidi perikanan di Pelabuhanratu disalurkan oleh dua lembaga, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhanratu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Bentuk subsidi yang dikelola oleh PPN berupa subsidi BBM berupa solar melalui SPDN dan SPBB yang tersedia di pelabuhan. SPDN khusus melayani kebutuhan solar dari kapal-kapal ukuran < 30 GT, sedangkan SPBB melayani kapal-kapal besar ukuran ≥ 30 GT.

Subsidi perikanan tangkap laut sangat identik dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk

nelayan. Jenis bantuan dan subsidi yang diberikan kepada para nelayan beragam. Subsidi atau bantuan yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi berupa sarana penangkapan secara lengkap, seperti pemberian bantuan armada penangkapan beserta alat tangkapnya. Ada juga bantuan berupa alat bantu penangkapan, seperti rumpon diberikan kepada kelompok nelayan yang lulus seleksi setelah mengajukan proposal bantuan. Selain bantuan fisik tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi juga memberikan bantuan berupa uang tunai. Bantuan uang tersebut diperuntukkan sebagai modal mengkonversi armada penangkapan nelayan dengan alat tangkap payang menjadi kapal rumpon. Bantuan dan subsidi perikanan yang diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada nelayan Pelabuhanratu disajikan pada Tabel 1.

**1. Subsidi bahan bakar (BBM) solar**

Subsidi langsung berupa pengurangan harga BBM digulir kepada nelayan-nelayan kecil (perahu ukuran < 10 GT). BBM bersubsidi diberikan dengan harga Rp 4.300,00 atau Rp 200,00 per liter lebih murah dibanding harga normal yang sebesar Rp 4.500,00 per liter. Tempat pengisian BBM dibuatkan khusus melalui SPDN yang dibangun di dalam PPN Pelabuhanratu. SPDN ini dikelola oleh koperasi unit desa (KUD). Pasokan solar bersubsidi selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Pihak pelabuhan juga menyediakan BBM melalui SPBB dan SPBN bagi para pengusaha dan perusahaan di industri perikanan dengan harga normal. SPBB dan SPBN memiliki cadangan BBM non-subsidi yang lebih banyak daripada SPDN karena kapal yang digunakan juga berukuran lebih besar.

**2. Bantuan modal untuk mengkonversi kapal**

Sebagian besar nelayan di Pelabuhanratu menggunakan alat tangkap payang dan jaring insang (*gillnet*). Namun sudah hampir setahun ini, kedua alat tangkap tersebut tidak dapat digunakan lagi karena lokasi penangkapan yang semakin jauh dan hasil tangkapan yang semakin menurun (PPN Pelabuhanratu, 2009). Menurut data statistik PPN Pelabuhanratu (2009),

jumlah perahu payang yang ada saat ini mencapai 70—80 unit. Pemerintah memberikan bantuan modal secara bergulir sebesar Rp 450 juta untuk memodifikasi perahu payang menjadi perahu dengan alat tangkap pancing tonda sebagai penyesuaian wilayah tangkap. Bantuan ini telah disalurkan untuk 30 nelayan sesuai dengan tingkat keparahan dalam perbaikan kapal. Namun, bantuan ini macet karena banyak nelayan yang tidak mengembalikan bantuan untuk digulirkan kepada nelayan yang lain. Akibatnya, nelayan-nelayan yang belum mendapat bantuan menjadi apriori terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi karena dianggap tidak adil dan tidak transparan dalam menyalurkan bantuan.



**Gambar 1. Perahu Jaring Insang (*Gillnet*) dan Payang yang Terbengkalai karena tidak Digunakan Lagi.**

Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2011)

**Tabel 1. Jenis dan Bentuk Subsidi Perikanan Tangkap di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.**

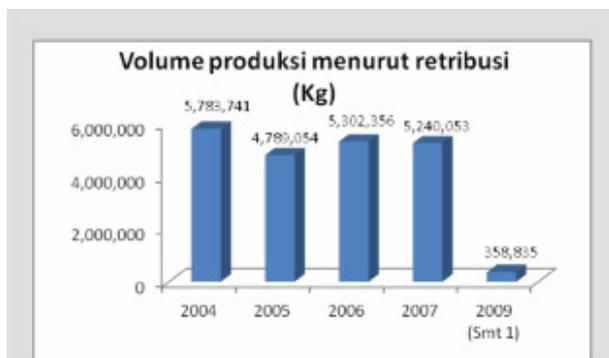
No.	Bentuk-bentuk subsidi	Jenis subsidi		Sumber dana
		Langsung	Tidak langsung	
1.	Subsidi BBM	√		APBN
2.	Bantuan kapal	√		APBD
3.	Bantuan alat tangkap	√		APBD
4.	Bantuan modal untuk mengkonversi perahu payang menjadi perahu pancing tonda		√	APBD
5.	Rumpon		√	APBD

Sumber: Dinas Kelautan Kabupaten Sukabumi (2009)

Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi memberikan bantuan segar untuk mengkonversi perahu dengan genset mini agar perahu mampu menempuh lokasi penangkapan yang lebih jauh. Lokasi penangkapan yang semakin jauh ini diakui oleh pemilik perahu payang sebagai akibat dari rumpon yang dipasang di sekitar perairan Pelabuhanratu. Akibatnya, ikan-ikan banyak berkumpul di rumpon yang letaknya tidak mampu dijangkau oleh perahu payang. Selain mengkonversi mesin kapal, nelayan pun harus memodifikasi perahunya menjadi lebih ramping agar tidak oleng diterjang ombak yang semakin besar. Dengan penyesuaian armada dan alat tangkap ini, nelayan bisa mencapai rumpon yang dipasang untuk membantu nelayan dalam mencari ikan sehingga wilayah penangkapan yang dituju sudah pasti.

### 3. Bantuan Rumpon

Data statistik PPN Pelabuhanratu menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2004—2009) jumlah tangkapan ikan nelayan cenderung mengalami penurunan. Volume produksi ikan hasil tangkapan di Kecamatan Pelabuhanratu berfluktuasi dalam rentang waktu tersebut (Gambar 2). Volume tertinggi dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 5.783.741 kg. Pada tahun berikutnya, volume produksi ikan menurun hingga 17,2 persen yang menjadi 4.789.054 kg. Meskipun pada tahun 2006 volume produksi meningkat, namun pada tahun 2007 volume produksi kembali turun. Bahkan, volume produksi ikan pada pertengahan tahun 2009 sangat rendah yang hanya mencapai 358.835 kg. Menurunnya hasil tangkapan ini mendorong nelayan untuk menempuh perjalanan yang panjang karena wilayah penangkapan (*fishing ground*) semakin jauh. Namun, perahu atau kapal yang dimiliki sebagian besar nelayan Pelabuhanratu tidak menunjang untuk sampai ke wilayah penangkapan yang jauh (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2009).

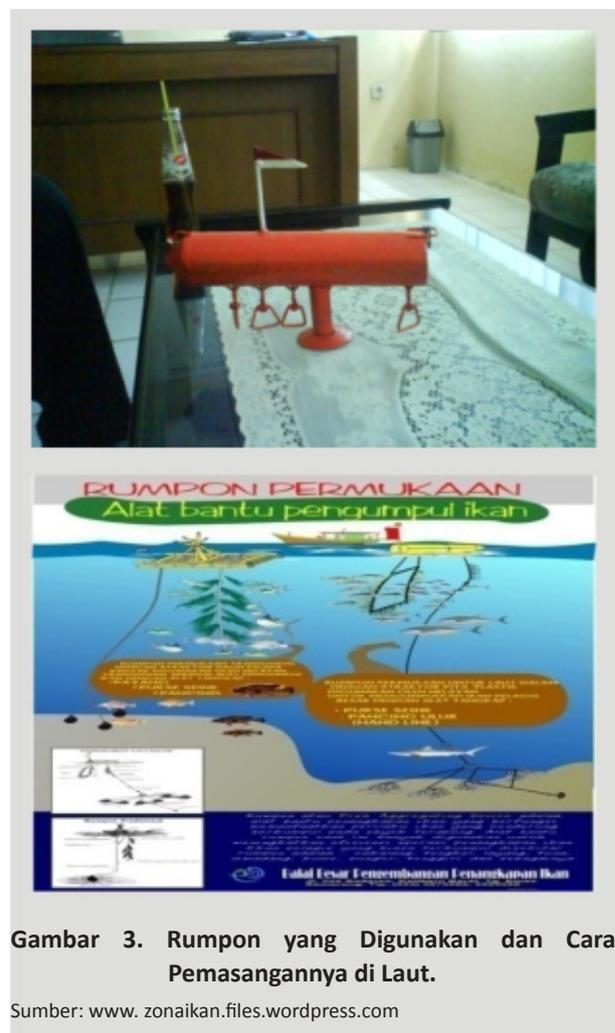


Gambar 2. Volume Produksi Ikan di Kecamatan Pelabuhanratu Berdasarkan Retribusi TPI.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (2009)

Penurunan produksi akibat keterbatasan armada penangkapan nelayan tersebut sebenarnya dapat diatasi melalui pemberian bantuan armada penangkapan

dan alat tangkap yang lebih besar. Namun, langkah ini dinilai tidak tepat karena akan berpotensi mengancam kelestarian sumberdaya. Untuk itu, pemasangan rumpon di perairan Pelabuhanratu merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan usaha nelayan dan kelestarian sumberdaya tersebut (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, 2009). Rumpon adalah alat bantu yang dipasang untuk menangkap ikan. Rumpon juga sering disebut dengan rumah ikan karena mampu membuat ikan-ikan berkumpul di sana sebagai tempat mencari makanan. Dengan bantuan rumpon, ikan-ikan akan berkumpul di sekitarnya sehingga mempermudah nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan dan membantu nelayan mendapatkan ikan dengan mudah. Bentuk rumpon yang digunakan seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.



Gambar 3. Rumpon yang Digunakan dan Cara Pemasangannya di Laut.

Sumber: [www.zonaikan.files.wordpress.com](http://www.zonaikan.files.wordpress.com)

Rumpon biasanya dilengkapi dengan pelepah pohon kelapa sebagai sumber makanan ikan agar ikan-ikan tetap berkumpul di sekitar rumpon. Namun demikian, saat ini sebagian besar pelepah pohon kelapa diganti dengan tali plastik rafia. Hal ini dilakukan karena tali rafia lebih praktis dan tahan lama sehingga tidak perlu diganti dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk menjaga agar tali tidak kusut dan terpelintir,

biasanya dipasang beberapa cincin di sepanjang tali rafia tersebut.

Saat ini, jumlah rumpon yang berasal dari bantuan pemerintah berjumlah 40 unit dengan jarak per rumpon sejauh 8 mil. Harga rumpon per unit rata-rata sebesar Rp 60 juta tetapi ada juga rumpon yang seharga Rp 150 juta karena bahan baku yang digunakan lebih tahan lama (Dinas Kelautan Kabupaten Sukabumi, 2009). Sebuah rumpon diperuntukkan bagi satu kelompok nelayan yang terdiri atas lima kapal nelayan. Secara teori, keberadaan tiap-tiap rumpon dirahasiakan agar kelompok nelayan lain tidak bisa sembarangan menangkap di semua rumpon yang ada. Namun, prakteknya hal itu sangat sulit dilakukan karena faktor belas kasihan karena sekelompok nelayan bisa membawa hasil tangkapan yang banyak, sedangkan ada kelompok lain yang tidak mendapat hasil tangkapan sama sekali.

#### 4. Bantuan Melalui Program Aspirasi

Sejak tahun 2008, pemerintah menggulirkan sebuah program bantuan baru yang melibatkan DPRD Kabupaten Sukabumi dengan nama Bantuan melalui Program Aspirasi. Bantuan yang digulirkan ke nelayan adalah hasil dari aspirasi rakyat yang disampaikan kepada anggota DPRD yang turun ke lapangan untuk bertemu langsung dengan para nelayan. Setelah mendengar langsung dari nelayan, anggota DPRD menyampaikan aspirasi tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi untuk mengucurkan dana bantuannya sesuai dengan kebutuhan riil nelayan. Jadi, anggota DPRD di sini hanya menyampaikan aspirasi rakyat saja, tetapi dana bantuan tetap dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dalam bentuk hibah. Hingga saat ini, dana aspirasi telah digulirkan pada kegiatan perikanan tangkap (delapan kelompok nelayan), budidaya, dan pengolahan.

#### KESIMPULAN

Subsidi perikanan yang disalurkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi kepada nelayan Pelabuhanratu teridentifikasi sebagai subsidi langsung dan tidak langsung. Subsidi langsung yang diberikan berupa subsidi BBM, bantuan kapal, dan bantuan alat tangkap. Subsidi tidak langsung berupa bantuan modal untuk mengkonversi perahu payang menjadi perahu pancing tonda dan bantuan rumpon. Subsidi atau bantuan tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bantuan rumpon dinilai sebagai cara yang efektif untuk mengatasi keterbatasan armadapenangkapan nelayan yang tidak mampu menjangkau wilayah penangkapan (*fishing ground*) yang makin jauh akibat

kondisi penangkapan dan kapasitas berlebih (*overfishing and overcapacity*) di sekitar Teluk Pelabuhanratu. Melalui rumpon-rumpon tersebut, nelayan memiliki wilayah penangkapan yang lebih pasti karena rumpon sebagai tempat ikan berkumpul buatan manusia. Selain itu, rumpon yang diletakkan di perairan yang masih terjangkau oleh perahu nelayan sehingga nelayan tidak perlu khawatir untuk sampai ke wilayah penangkapannya.

Jenis bantuan baru yang dijumpai di Pelabuhanratu adalah bantuan melalui Program Aspirasi yang mulai dijalankan sejak tahun 2008. Jenis bantuan ini menunjukkan adanya peran serta DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan untuk menampung aspirasi nelayan tentang bantuan yang benar-benar dibutuhkannya. Program Aspirasi ini makin menegaskan bahwa keberadaan subsidi memberikan manfaat bagi nelayan dan pembudidaya dalam menjamin keberlanjutan usahanya. Keberpihakan pemerintah terhadap nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan masih sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agriefishery.2010.Rumpon.<http://www.zonaikan.files.wordpress.com>. Diakses tanggal 26 April 2012.
- Anonim. 2010. "Subsidi Perikanan Tetap Berlaku", dalam <http://bataviase.co.id/node/418600>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2012.
- APEC. 2000. Study into the Nature and Extent of Subsidies in the Fisheries Sector of APEC Members Economies. Fisheries Working Group, CTI 07/99T.
- Bambang (ed). 2010. "Indonesia Pertahankan Subsidi Perikanan Dalam Pertemuan APEC" dalam <http://www.antarane.ws.com/berita/1287052600/indonesia-pertahankan-subsidi-perikanan-dalam-pertemuan-apec>. Diakses tanggal 10 Januari 2012.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. 2009. Statistik Perikanan Kabupaten Sukabumi.
- Dwiponggo, A dan S. Ilyas. 1990., Dukungan Kelembagaan terhadap Perikanan dalam Pembangunan Perikanan Tahap II. Forum Perikanan I. Puslitbangkan-USAID.
- FAO. 2001. Fisheries Glossary and Encyclopedia Britannica. Publishing Management Services Information Devision. FAO: Rome.
- FAO. 2004. Fisheries Technical Paper No. 438. Lena Westlund: Guide for Identifying, Assesing and Reporting on Subsidies in the Fisheries Sector. Rome.

- Lukita, B.M. dan A. Mulyadi. 2011. Subsidi Benih Ikan Mulai 2012, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/06/17295417/>. Diakses tanggal 10 Januari 2012.
- Naamin, N dan A. Hardjamulia. 1990. Potensi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Makalah yang disampaikan pada Forum Perikanan I, Sukabumi 19 – 20 Juli. Puslitbangkan-USAID.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu. 2009. Statistik Perikanan Tahun 2009.
- Satria, et. al. 2009. Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?. IPB Press: Bogor.
- Uktolseja, J.C.H. 1990., Dukungan Kelembagaan terhadap Perikanan dalam Pembangunan Perikanan Tahap II (Dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan). Forum Perikanan I. Puslitbangkan-USAID.
- Wiium, V. 1999., Subsidies in Irish Fisheries: The Savior of Rural Ireland ?. Nat. Univ. of Ireland, Galway. Ireland.
- WTO Report. 2006. Subsidies, Trade and The WTO.